

## KECANDUAN KUASA: TIPOLOGI DAN PENYEBAB

*Damsar<sup>1</sup>, Indrayani<sup>2</sup>*

### *Abstract*

*This paper discuss on addict of the power, namely people who experienced an addict to the power both legislative and executive arena. This study try to find answers what kinds of social construction and how to interpret on the power due to people experienced an addict to the power as well as to construct typology of addict of the power. Data on addict of the power were collected through field research on 23 people who were legislative and executive arena in West Sumatra.*

**Keywords:** power, addict of the power, social construction of the power, interpretation of the power

### A. PENDAHULUAN

Pada saat Pemilihan Umum (pemilu) pertama dalam Era Reformasi akan dilaksanakan pada tahun 1999, maka menjelang tenggat waktu tersebut berdirilah banyak partai politik. Dari sekian banyak partai yang berdiri pada masa ini, setelah dilakukan verifikasi berdasarkan Undang-Undang nomor 2 Tahun 1999, partai politik yang diperkenankan mengikuti pemilihan umum hanya 48 partai politik. Jumlah partai politik yang begitu banyak memerlukan pula banyak orang untuk mengisi daftar calon anggota legislatif. Kebutuhan akan banyak orang, terutama latar belakang pendidikan dan pekerjaan yang dipandang baik, tidak mudah dipenuhi oleh partai politik. Kondisi ini membuat partai sulit untuk tidak mengajukan calon anggota legislatif yang tidak sesuai dengan harapan dan standar partai. Oleh sebab itu, tidak sedikit partai mengajukan calon anggota legislatif yang berlatar belakang tukang parkir, penjaga malam, bahkan penganguran dan dengan ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas yang disetarakan.

Ketika pemilu usai, sesuai dengan hukum kompetisi, ada yang terpilih dan banyak yang gagal. Pemberitaan media massa selalu berpihak kepada pemenang.

Sehingga peristiwa para pecundang tidak pernah menjadi perhatian. Pada hal peristiwa para pecundang menarik diperhatikan bahkan sebagai kajian penelitian. Peristiwa para pecundang terkait dengan pemilihan umum menjadi perhatian media massa setelah maraknya konflik inter partai. Konflik internal terkait dengan kecurangan yang dilakukan oleh sesama calon anggota legislatif yang berasal dari satu partai karena kursi yang diperoleh terkait dengan jumlah suara yang diraih, bukan berdasarkan nomor urut. Perhatian lebih terhadap para pecundang telah dimulai tesejak 2 pemilu terakhir ini, yaitu pemilu 2009 dan 2014. Persoalan para pecundang menghadapi kekalahan semakin mengkristal di hadapan publik ketika banyak para calon anggota legislatif dan calon kepala daerah kalah dan mengalami kehormatan diri hilang, terkucilkan, dan depresi berat.

Perasaan kehilangan kehormatan diri, terkucilkan dan depresi berat juga dapat ditelusuri pada beberapa peristiwa orang yang kehilangan jabatan, diberhentikan dari pekerjaan, dan lainnya. Fenomena ini merupakan realitas relasi antara kuasa dan penggunaannya. Keadaan psikologi sosial tersebut, sebagian di antaranya, terkait dengan kecanduan terhadap kuasa. Realitas relasi kuasa dan

<sup>1</sup> Guru besar Sosiologi FISIP Universitas Andalas

<sup>2</sup> Doktor dalam Psikologi Industri dan Organisasi/Dosen Pasca Sarjana Sumberdaya Manusia Universitas Batam

penggunaannya telah lama menjadi studi sosiologi dan antropologi, khususnya sosiologi politik dan antropologi politik. Namun studi tentang relasi kuasa dan penggunaannya sehingga menimbulkan kecanduan kuasa belum ada penelitian tentang hal tersebut.

Kecanduan kuasa merupakan kajian studi sosiologi dan antropologi yang dipandang penting untuk dilakukan. Paling tidak ada dua alasan mengapa kajian ini penting dilakukan: pertama studi tentang kecanduan kuasa belum pernah dilakukan. Kedua, tatkala kecanduan kuasa dikaitkan pada dampak yang ditimbulkannya terhadap kelompok orang dan kehidupan masyarakat secara keseluruhan maka ia dapat memengaruhi sistem demokrasi pada tingkat keluarga, masyarakat dan negara.

Studi ini mencoba untuk menemukan jawaban tentang interpretasi dan konstruksi sosial tentang kuasa seperti apa dan bagaimana sehingga seseorang mengalami kecanduan kuasa. Selanjutnya studi ini ingin menemukan tipologi dan penyebab kecanduan kuasa tersebut.

Untuk menjawab pertanyaan studi tersebut di atas dilakukan penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian dilakukan tentang 23 mantan pejabat eksekutif, anggota legislatif, calon kepala daerah, dan calon anggota legislatif di Sumatera Barat. Mereka semua mantan pada masa Orde Baru dan/atau Era Reformasi. Pemilihan informan penelitian dilakukan secara sengaja. Semua informan penelitian telah memiliki hubungan sosial yang cukup lama dengan peneliti, paling kurang telah berinteraksi sosial paling sedikit 2 tahun. Wawancara mendalam tidak hanya dilakukan terhadap para mantan tersebut di atas tetapi juga terhadap keluarga dan sahabat dari para mantan. Hubungan sosial yang relatif lama dengan informan penelitian memudahkan peneliti untuk melakukan wawancara mendalam dengan pihak terkait misalnya keluarga atau kolega dari para mantan tersebut. Penelitian dihentikan tentang seorang mantan bila prinsip kejenuhan data terpenuhi, yaitu apabila semua data yang diperlukan tentang seorang mantan telah dipenuhi dengan jawaban yang relatif seragam atau sama baik dari mantan maupun dari keluarga atau kolega mantan tersebut.

## B. KAJIAN TEORI

**K**uasa dipahami dalam arti kamus sebagai: satu, kemampuan atau kesanggupan (untuk berbuat sesuatu); kekuatan; dua, wewenang atas sesuatu atau untuk menentukan (memerintah, mewakili, mengurus, dsb) sesuatu; tiga, pengaruh (gengsi, kesaktian, dsb) yang ada pada seseorang karena jabatannya (martabatnya); empat, mampu; lima, orang yang diserahi wewenang. Arti kamus tersebut dapat diperluas dalam pengertian akademik, yaitu kuasa sebagai suatu kemampuan untuk menguasai atau memengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu atau kemampuan untuk mengatasi perlawanan dari orang lain dalam mencapai tujuan, khususnya untuk memengaruhi perilaku orang lain (Damsar, 2010).

Pengertian kuasa seperti di atas bersifat netral, tidak terkait dengan hal yang positif maupun negatif. Itu artinya, negatif atau positifnya suatu kuasa tidak tergantung pada substansi kuasa itu sendiri, melainkan tergantung pada orang yang menggunakannya. Apabila kuasa digunakan oleh orang baik dan benar, maka konsekuensi dari penggunaan kuasa tersebut akan berujung pada hal yang positif. Sebaliknya apabila kuasa digunakan oleh orang jahat dan salah, maka konsekuensinya akan berujung pada hal yang negatif. Apabila pisau, misalnya sebagai analogi penggunaan kuasa, digunakan oleh perampok, maka ia bisa dipakai untuk menodong atau membunuh orang. Sebaliknya pisau yang sama apabila digunakan oleh juru masak (koki), maka ia akan berfungsi sebagai peralatan dapur atau memasak, untuk memotong buah atau mengiris cabe misalnya.

Neutrality of power can be demonstrated if power has been interpreted and constructed by an individual. Interpretation and construction of social power about power is related to *stock of knowledge* (cadangan pengetahuan) of an individual, namely knowledge about the practical use of life in the world, which I have is the world I have which is organized according to my project. In a certain stage of development, *stock of knowledge* is categorized, namely classifying experience by looking at its commonality with others.

Sehingga kita memiliki dunia bersama dengan orang lain (*live world*), yang menjadi dasar bagi semua aktivitas sosial kita (Craib, 1984). Cadangan pengetahuan seseorang tentang kuasa menjadi rujukan awal dalam bertindak, yang selanjutnya dapat berubah dalam proses dialektika.

Ketika kuasa tidak netral, tetapi telah diinterpretasi dan dikonstruksi oleh seseorang, maka proses interpretasi dan konstruksi tersebut dapat menyebabkan kuasa menjadi candu, sehingga kecanduan kuasa. Kecanduan, secara medis, dapat didefinisikan sebagai gangguan zat psikoaktif atau substansi secara berulang-ulang dan mengalami kesulitan untuk menghentikan penggunaan zat tersebut secara sukarela. Kecanduan dilihat sebagai sebuah kondisi kronis dalam sistem motivasi dalam perilaku mencari hadiah (*reward-seeking behaviour*) telah menjadi lepas kendali (West, 2006). Sedangkan Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kecanduan sebagai kejangkitan suatu kegemaran (hingga lupa hal-hal yang lain). Dari definisi medis dan kamus tersebut maka kecanduan secara sosiologis dapat diartikan sebagai kejangkitan suatu kegemaran atau aktifitas dari kehidupan sehingga sulit menghentikannya atau membuat lupa aktifitas kehidupan yang lainnya. Dengan merujuk pada definisi tersebut, maka kecanduan kuasa dapat dipahami sebagai kejangkitan terhadap kuasa sehingga sulit menghentikannya atau membuat lupa aspek kehidupan lainnya, selain kuasa.

Kuasa adalah candu! Ini mirip adagium Karl Marx yang menyatakan agama adalah opium (Marx, 1943/1970). Bagaimana bisa, kuasa adalah candu, sedangkan di atas dikatakan kuasa adalah netral? Untuk itu terlebih dahulu mari buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, agar paham arti candu. Ada 3 pengertian candu di sana, yaitu: satu, getah kering pahit berwarna cokelat kekuning-kuningan yang diambil dari buah *Papaver somniferum*, dapat mengurangi rasa nyeri dan merangsang rasa kantuk serta menimbulkan rasa ketagihan bagi yang sering menggunakan; dua, cairan kental berwarna hitam yang keluar dari rokok yang diisap yang melekat pada pipa; tiga, sesuatu yang menjadi kegemaran. Jadi, kalau begitu candu adalah sesuatu yang menjadi

kegemaran dan menimbulkan ketagihan bagi yang sering menggunakan. Apabila kuasa telah menjadi kegemaran dan menimbulkan ketagihan bagi yang sering menggunakan maka kuasa adalah candu bagi dirinya.

Kecanduan kuasa, oleh karena itu, ditandai oleh kegemaran terhadap kuasa dan ketagihan pada kuasa. Tingkatan ekstrim dari candu kuasa adalah sakau kuasa, yang ditandai oleh keberadaan *post-power syndrome*. Fenomena *post-power syndrome* tidak lepas dari situasi psikologi sosial terkait dengan interpretasi dan konstruksi sosial tentang kuasa. Interpretasi dan konstruksi sosial ini pada gilirannya mengarahkan seseorang bagaimana kuasa digunakan, dilaksanakan, dan dimanfaatkan. Pada stadium ini, kuasa telah menjadi candu berat bagi pengelolanya, sehingga akhirnya dia merasakan tahap sakau kuasa.

Interpretasi sosial merupakan proses sosial dalam relasi sosial. Proses interpretasi sosial diperlukan dalam memahami dan membentuk kenyataan sosial. Proses pemahaman dan pembentukan kenyataan sosial terjadi secara dialektik dalam suatu rangkaian 3 proses, yaitu eksternalisasi, objektivikasi, dan internalisasi (Berger dan Luckman, 1990). Individu dibentuk oleh masyarakat melalui proses obyektivikasi. Namun karena proses internalisasi atau sosialisasi tidak pernah sempurna, maka pada gilirannya individu membentuk masyarakat, dalam konteks interaksi sosial secara bersama melalui proses eksternalisasi. Sesuatu yang dibentuk oleh individu secara bersama tersebut mengalami kristalisasi, perlahan mengeras bagai kristal sebagai sesuatu yang objektif. Proses tersebut terjadi melalui objektivikasi. Dengan demikian, kenyataan sosial merupakan proses dialektika antara objektivikasi, internalisasi, dan eksternalisasi. Proses kuasa sebagai suatu yang netral menjadi candu kuasa terjadi melalui dialektika objektivikasi, internalisasi, dan eksternalisasi. Proses konstruksi sosial ini melahir tipe kepemimpinan tertentu seperti kepemimpinan otoriter, demokratis, partisipatif, atau *laissez faire*.

Kuasa dalam penggunaannya tidak lepas dari pertukaran. Manusia sebagai makhluk yang rasional, senantiasa memperimbangkan untung rugi (*cost-benefit ratio*). Melalui cara ini, orang menghitung dan

membuat pilihan yang dapat memperbesar kesenangan pribadi atau keuntungan pribadi, dan mengurangi penderitaan atau menekan biaya (Poloma, 1984; Johnson, 1986).

### C. KONSTRUKSI SOSIAL ATAS KUASA

**P**roses bermula dari interpretasi tentang kuasa. Konsep kuasa dipahami setiap orang secara berbeda. Perbedaan ini dikarenakan kondisi dan situasi sosial setiap individu berbeda menurut ruang dan waktu. Pada masa Orde Baru, sistem penjenjangan karir jabatan struktural pegawai negeri sipil di birokrasi pemerintahan dan jabatan politik di parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) relatif stabil dan jelas. Ketika seseorang telah diberi suatu kuasa pada jabatan tertentu di birokrasi pemerintahan, maka sampai memasuki masa pensiun dia akan tetap memegang kuasa tersebut, malahan bisa lebih tinggi atau lebih besar kuasa yang dipegang dibandingkan dengan masa lampau. Demikian juga dengan seseorang yang berada dalam jabatan politik, bila dia telah memegang suatu jabatan struktural yang strategis di partai maka kemungkinan memiliki kuasa di parlemen dapat diprediksi lebih akurat. Sistem pemilihan umum yang berlandaskan pada nomor urutan, menutup peluang manuver individual mendulang suara dalam rangka mengumpulkan suara terbanyak sehingga bisa mendapat kuasa menjadi anggota parlemen. Interpretasi kuasa seperti ini bertahan sampai berakhirnya masa Orde Baru.

Pada masa Era Reformasi, sistem penjenjangan karir jabatan pegawai negeri sipil dan jabatan politik berubah signifikan dibandingkan dengan masa sebelumnya. Sistem penjenjangan karir jabatan sipil struktural pegawai negeri tidak lagi stabil dan menjadi kabur. Setiap pejabat struktural pada Era Reformasi bisa saja seketika diganti tanpa didahului sinyal pergantian. Pada masa ini, sistem penjenjangan karir tidak punya makna. Karir seseorang tidak lagi ditentukan oleh kompetensi, kapabilitas, dan pengalaman jabatan, tetapi ditentukan oleh kedekatan seseorang terhadap pusat kekuasaan (penguasa). Ketidakstabilan dan ketidakpastian genggaman kuasa di tangan menyebabkan terjadinya dialektika baru

dalam konstruksi sosial atas kuasa. Proses dialektika melalui objektivasi, internalisasi dan eksternalisasi terus berlangsung mengikuti ritma perubahan aturan perundangan dan pola kepemimpinan yang ada.

Realitas kuasa sebagai suatu hasil dari objektivasi dimengerti dan dipahami tidak secara sempurna. Sehingga internalisasi atau sosialisasi terhadap pola yang ada dari realitas kuasa terlaksana dalam kondisi yang tidak sempurna pula. Keadaan seperti ini memberikan ruang kepada individu untuk mengonstruksi suatu realitas kuasa yang tidak persis sama dengan sebelumnya. Konstruksi sosial atas kuasa ini melibatkan aktor lainnya seperti anggota keluarga, kolega, atau warga lingkungan tempat tinggal.

### D. TIPOLOGI KECANDUAN KUASA

**P**roses interpretasi dan konstruksi sosial atas kuasa, seperti yang didiskusikan di atas, menghasilkan 3 tipe kecanduan kuasa, yaitu:

#### 1. Gemar Kuasa

Kuasa adalah hobi atau kegemaran. Sebagai suatu hobi atau kegemaran, kuasa dinikmati bagaikan menikmati sebuah hobi atau kegemaran, misalnya hobi bersilancar. Hidup terasa tidak bergairah, bila hobi atau kegemaran tidak tersalurkan. Hidup terasa hampa, bila tidak punya kuasa. Oleh sebab itu, kapan saja ada momen penyaluran hobi atau kegemaran untuk memiliki kuasa, maka dia akan bersilancar menundukkan gelombang persaingan bahkan badi konflik sekalipun.

Fenomena gemar kuasa ini muncul pada Era Reformasi. Mereka berasal dari kelompok masyarakat lapisan menengah ke atas dan telah mapan dalam bidang ekonomi. Dalam konteks ini, ada kecenderungan mereka memperluas cakupan kuasa dari kuasa ekonomi menjadi kuasa politik. Pada umumnya, sebelum mendapatkan jabatan di parlemen dan/atau di pemerintahan, terlebih dahulu mereka mengincar jabatan strategis di partai politik. Setelah itu mereka mengincar kuasa politik di parlemen sebagai anggota dewan, kemudian jabatan top eksekutif seperti kepala atau wakil kepala daerah sebagai

walikota, bupati, gubernur atau wakilnya. Namun sebagian kecil di antara mereka ada yang langsung mengincar jabatan top eksekutif.

Sebelum Undang Undang tentang Aparatur Sipil Negara disahkan, hobi terhadap kuasa juga dimiliki oleh sebagian pejabat struktural di daerah. Ramainya pejabat struktural hobi kuasa disebabkan oleh adanya kesempatan menyalurkan hobi dan keyakinan untuk menambah kuasa atau memperluas kuasa karena merasa telah memiliki jaringan dan basis masa pemilih. Memang dalam kenyataannya para pejabat struktural memiliki jaringan yang kuat sampai kepada akar rumput. Kenyataan ini bisa dipahami bahwa karena pada umumnya pejabat struktural telah lama melaksanakan tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga terkonstruksi suatu jaringan hubungan yang mendalam antara mereka dengan massa pemilih. Di antara mereka ada yang berkariir menjadi pejabat struktural di berbagai tempat sehingga hal tersebut menjadi simpul jaringan massa pemilih potensial ketika mereka maju menjadi calon top eksekutif.

## 2. Diri Kuasa

Kuasa adalah eksistensi diri. "Aku kuasa, aku ada", inilah pandangan tentang diri kuasa. Oleh sebab itu, bila kuasa tidak berada dalam genggaman, maka eksistensi diri dipandang tiada. Ketika kuasa berada dalam genggaman, kuasa dipandang tidak akan pernah terlepas dari tangan, karena digenggam erat. Siapa saja bawahan atau kader yang dipandang cakap, kompeten, dan terampil untuk mengerjakan tugas dan fungsi dari jabatan struktural yang dipegang, maka dia akan berusaha untuk mensukseskan bawahan atau kadernya, sehingga bawahan atau kadernya tersebut menjadi klien yang patuh dan manut pada patron. Pemegang kuasa tersentak kaget ketika hukum besi usia pensiun menjeratnya. Kuasa yang menjadi identitas diri terlepas dari genggaman karena memasuki masa pensiun. Fenomena seperti ini terjadi pada umumnya pada masa Orde Baru. Memang pada masa lampau, sekali memegang jabatan struktural sampai

pensiun akan tetap memegangnya. Sehingga kuasa melekat pada diri.

Sedangkan pada masa Era Reformasi, kuasa sebagai eksistensi diri dipraktekan berbeda dengan masa lampau. Diri kuasa mengambil bentuk yang berbeda. Pejabat struktural di pemerintahan, baik provinsi maupun kabupaten dan kota, memahami kenyataan bahwa posisinya setiap saat bisa dicopot atau diganti oleh orang lain. Oleh sebab itu, kalau diri ingin tetap berkuasa maka dia harus mampu memprediksi secara tepat siapa pemenang dari calon kepala daerah dari pasangan calon yang ada dan turut serta menjadi tim sukses calon tersebut, bahkan ada yang menjadi penyandang dana meski tidak besar jumlahnya. Kalau gagal maka kuasa akan terlepas dari genggaman. Konsekuensi logis dari keadaan ini adalah merebaknya perpecahan dan fitnah di kalangan birokrasi.

Selain itu, fenomena baru diri kuasa agar diri tetap menggenggam kuasa adalah menggenggam kuasa melalui tangan orang lain, khususnya orang terdekat berdasarkan pertalian darah maupun perkawinan seperti anak, istri, menantu, besan, dan lainnya. Ketika kuasa tidak mungkin lagi digenggam karena aturan perundangan, sementara diri ingin tetap kuasa, meskipun tidak secara langsung, maka dikonstruksikan secara sosial politik, anak menantu, besan atau istri untuk mengantikan kedudukannya.

## 3. Sakau Kuasa

Tingkatan ekstrim dari kuasa sebagai candu adalah sakau kuasa yang ditandai dengan munculnya otoriteriasme dalam penggunaan kuasa dan *post-power syndrome*, yaitu gejala yang terjadi di mana seorang tenggelam dalam bayang-bayang masa lampau yang digdaya, adikuasa, adiperkasa, dan sakti sehingga tidak menerima keadaan dan kenyataan sekarang di mana kuasa tidak lagi dalam genggaman. Gemar kuasa dan diri kuasa dapat bertransformasi menjadi sakau kuasa, ketika gemar kuasa dan diri kuasa tidak mampu mengendalikan diri pada saat kuasa berada dalam genggaman atau ketika ia tidak lagi berada dalam genggaman. Pada saat kuasa dalam genggaman, kuasa dikelola secara otoriter. Pengelolaan kuasa dikelola secara otoriter ditandai dengan:

- a. Kewenangan mutlak berada pada pimpinan

Kewenangan adalah suatu bentuk kekuasaan yang legal formal. Ketika kewenangan merupakan sesuatu yang absolut (mutlak), seperti halnya kekuasaan mutlak, maka ia akan cenderung dikorup. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Sir John Dalberg-Acton: "*Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely.*" (kekuasaan cenderung korup, dan kekuasaan mutlak cenderung korup secara mutlak pula). Kewenangan mutlak menyebabkan pimpinan berperilaku korup karena kemutlakan itu sendiri. Kemutlakan membuat orang yang memegang kuasa menjadi lupa bahwa kuasa memiliki batas. Pemegang kuasa menjadi kehilangan kontrol terhadap diri karena tidak bisa memisahkan batas antara diri dengan kuasa. Batas antara keduanya menjadi kabur: diri adalah kuasa, kuasa adalah diri. Ia mengalami sakau kuasa pada saat memegang kuasa. Pemegang kuasa seperti ini, pada saat diri tidak lagi memegang kuasa, diri merasa terasing terhadap diri sendiri dan komunitas di mana kuasa itu diperankan.

- b. Keputusan dan kebijakan selalu dibuat oleh pimpinan

Kuasa dimiliki sendiri oleh pemimpin. Sedangkan orang lain atau bawahan tidak diberi kesempatan untuk berbagi kuasa. Pemimpin tidak perlu meminta pandangan, pendapat, atau gagasan dari bawahan. Pemimpin memandang tidak penting perlunya ruang bagi bawahan untuk menyampaikan saran, pertimbangan atau pendapat. Apa yang menjadi keputusan dan kebijakan merupakan hak pimpinan, sedangkan bawahan berkewajiban melaksanakan semua kebijakan dan yang diputuskan. Hampir semua keputusan dan kebijakan dibuat oleh pemimpin. Kuasa digenggam sendiri oleh pemimpin sehingga tidak ada ruang bagi bawahan mengaktualisasikan potensi dalam mengelola kuasa.

Kondisi ini menyebabkan pemimpin menjadi candu kuasa. Diri lupa bahwa kuasa memiliki akhir sebagaimana ia memiliki awal. Ketika diri tidak lagi memiliki kuasa, sementara diri tidak memiliki pengalaman berbagi kuasa, sedangkan

dalam kenyataan hidup di ruang publik dan domestik berbagi kuasa dalam membuat keputusan dan kebijakan menjadi keharusan, di sinilah muncul perasaan diri tidak berdaya, lemah, dan tidak diperhatikan.

- c. Komunikasi berlangsung satu arah dan instruktif dari pimpinan kepada bawahan

Titah pemimpin adalah kalimat perintah. Pemimpin memberikan instruksi, sedangkan bawahan menjalankan perintah. Pemimpin menyampaikan apa yang telah menjadi keputusan dan kebijakan, sedangkan bawahan melaksanakan semua kebijakan dan apa yang telah diputuskan. Tidak ada ruang bagi dialog, diskusi, atau tukar pendapat antara pemimpin dan bawahan. Komunikasi satu arah seperti ini menciptakan jarak antara pemimpin dan bawahan, menghambat pemimpin untuk menajamkan kepedulian terhadap bawahan, dan membonsai potensi komunikasi dialogis antara pemimpin dan bawahan. Kondisi seperti ini dapat memengaruhi pemimpin menjadi candu kuasa. Sesuatu bisa diperoleh dengan mengeluarkan perintah. Kondisi seperti ini bisa menjadi suatu kenikmatan. Nikmat karena dengan hanya mengeluarkan instruksi, sesuatu bisa didapatkan.

Komunikasi seperti ini pada gilirannya menciptakan kondisi keterasingan diri terhadap mantan bawahan. Pemimpin tidak memiliki *stock of knowledge* bagaimana berkomunikasi dialogis humanis antar sesama manusia dan tanpa terbebani oleh relasi pemimpin – bawahan di masa lampau. Kondisi keterasingan diri seperti ini dipertegas ketika kuasa tidak lagi dalam genggaman. Perintah dan instruksi tidak menjadi mangkus lagi, karena kuasa tidak lagi dimiliki. Diri dirasakan tidak ada gunanya lagi karena kuasa tidak digenggaman.

- d. Kontrol ketat, miskin pujian dan kasar terhadap bawahan

Kontrol terhadap sikap, perilaku, perbuatan atau kegiatan para bawahan dilaksanakan secara ketat. Pemimpin memiliki cara efektif untuk mengontrol para bawahan, seperti melakukan adu domba terhadap sesama bawahan. Melalui politik

“adu domba”, pemimpin menciptakan saling curiga antara satu sama lain di kalangan bawahan. Sehingga setiap bawahan melaporkan bawahan lainnya kepada pemimpin. Situasi ini membuat orang yang paling dipercaya bawahan hanyalah pemimpin saja. Pemimpin menikmati situasi ini. Kenikmatan seperti inilah dipandang candu kuasa.

Pemimpin pelit mengucapkan pujian terhadap bawahan. Puja pujian hanya ditujukan kepada pimpinan. Jangan pernah bawahan memuji orang, kecuali pimpinan. Kalau ada bawahan memuji orang lain, bukan pemimpin, maka sumpah serapah akan keluar dari mulut pemimpin. Ucapan kasar yang dikeluarkan oleh pemimpin tersebut adalah merupakan tabiat (habitus). Oleh karena itu, bawahan jangan berharap mendapat pujian dan kalimat yang lembut dari pemimpin. Sebaliknya, situasi seperti ini dipandang oleh pemimpin sebagai sesuatu yang seharusnya terjadi dan merupakan hak pemimpin untuk mendapatkannya.

e. Prakarsa dan tanggungjawab keberhasilan organisasi milik pimpinan

Pemimpin adalah sumber mata air pengetahuan, gagasan, pemikiran dan kebijakan. Oleh sebab itu prakarsa segala sesuatu harus selalu bermula dari pimpinan, sedangkan bawahan hanya me nerjemahkan, melaksanakan dan mengek sekusi apa yang telah ditetapkan oleh pemimpin. Jika hasil terjemahan diragukan maka bawahan wajib minta petunjuk dan arahan dari pemimpin. Meskipun budaya minta petunjuk tidak lagi populer istilahnya pada Era Reformasi, namun budayanya masih eksis dalam kehidupan birokrasi dengan intensitas yang sedikit lebih lunak, seperti budaya perilaku mohon arahan atau menghadap pimpinan.

Keberhasilan organisasi meraih sesuatu adalah milik pemimpin. Karena pemimpinlah segala sesuatu itu bisa diraih. Perilaku pemimpin seperti ini mengabaikan kontribusi bawahan dalam raihan capaian yang ada. Sebaliknya jika organisasi tidak berhasil meraih sesuatu yang telah ditetapkan maka kegagalan tersebut berada di pundak bawahan.

Konstruksi relasi pemimpin – bawahan seperti tersebut di atas menciptakan situasi di mana kuasa merupakan suatu kenikmatan. Bila kenikmatan kuasa telah mencapai puncaknya, maka pemimpin akan menjadi candu kuasa. Pada saat kenikmatan tersebut dirasakan pada masa jabatannya, pemimpin telah mengalami sakau kuasa.

f. Pimpinan menuntut prestasi sempurna dan kesetiaan dari bawahan tanpa syarat

Prestasi optimal harus ditunjukkan oleh bawahan dalam setiap kesempatan. Bawahan tidak diberi ruang untuk melakukan suatu kekeliruan. Juga bawahan diminta memperlihatkan kesetiaan tanpa syarat kepada pemimpin. Kedua hal tersebut diperoleh pemimpin melalui penggunaan kekerasan kuasa berupa paksaan, ancaman dan hukuman. Penggunaan kekerasan kuasa untuk mendapatkan prestasi sempurna dan kesetiaan tanpa syarat bawahan tersebut menjadi suatu bentuk kenikmatan bagi pemimpin. Dalam situasi seperti ini, pemimpin merasakan kenikmatan pada saat penggunaan kekerasan kuasa. Ketakutan mendalam yang diperlihatkan bawahan pada saat kekerasan kuasa digunakan adalah momen terindah dan ternikmat yang dirasakan pemimpin dalam penggunaan kuasa. Pemimpin seperti ini telah mengalami candu kuasa yang sangat akut. Kenikmatan seperti ini akan hilang pada saat kuasa hilang dalam genggaman, sementara pemimpin telah mencandu akan kuasa. Situasi seperti menyebabkan seorang masuk ke dalam *post power syndrom*, merupakan ciri dari sakau kuasa.

## E. SEBAB KECANDUAN KUASA

**T**emuan penelitian tentang beberapa tipe kecanduan kuasa di atas memperlihatkan bahwa sebab munculnya kecanduan kuasa dikarenakan oleh interpretasi dan konstruksi sosial tertentu atas kuasa dan solidaritas sosial yang dimiliki oleh seseorang. Konstruksi sosial atas kuasa, seperti dibahas di atas, tidak berada dalam ruang hampa sosial. Justru sebaliknya padat dengan proses dialektika antara aktor yang diberi ruang kreatifitas dan fakta sosial yang *determined*

melalui proses objektivikasi, internalisasi dan eksternalisasi. Realitas eksternal seperti sistem birokrasi pemerintahan, pola kepemimpinan, keluarga, dan semua aturan perundungan terkait dengan pemilihan umum, kepegawaian, dan lain sebagainya merupakan sesuatu yang dipertimbangkan dalam keputusan aktor dalam melakukan sesuatu, termasuk interpretasi terhadap kuasa. Berikut beberapa ruang sosial yang menjadi bingkai krontruksi sosial atas kuasa yang bisa menimbulkan kecanduan kuasa, yaitu antara lain:

### 1. Solidaritas sosial

Solidaritas sosial ada pada setiap komunitas atau kelompok masyarakat. Solidaritas sosial merupakan pengikat dalam komunitas atau kelompok masyarakat. Keluarga (batih) merupakan kelompok terkecil dan utama yang menjadi pengikat dan sekali gus benteng individu dalam berhadapan dengan pihak eksternal. Ikatan solidaritas yang terbangun dalam keluarga bisa mencegah atau mendorong seseorang terlibat dalam candu kuasa. Dalam kondisi bagaimana keluarga tidak mendorong individu menjadi candu kuasa?

Keluarga mengikat anggotanya untuk bersatu dalam berhadapan dengan orang lain dan membentengi anggotanya jika ada kompetisi atau konflik dengan pihak eksternal. Keluarga menggerakkan kapital finansial, sosial, dan budaya untuk memenangkan kompetisi atau konflik dengan pihak lain. Kompetisi atau konflik untuk meraih kuasa biasanya melibatkan keluarga, terutama kuasa dalam jabatan yang diraih melalui pemilihan rakyat (*general election*). Bila kuasa diraih melalui "lelang jabatan dengan sejumlah uang", keluarga juga ikut menggerakkan kapital finansial. Ini artinya, keluarga memberikan andil dalam keterlibatan anggotanya dengan kuasa. Keluarga dapat memengaruhi anggotanya untuk gemar kuasa atau tidak. Keluarga juga dapat memengaruhi anggotanya menjadi diri kuasa atau tidak.

Demikian pula keluarga dapat membentengi anggotanya tidak sakau kuasa, ketika ada anggota keluarga mengalami gemar kuasa atau diri kuasa. Keluarga membentengi anggota yang telah mengalami gemar kuasa atau diri kuasa melalui pendekatan rasionalitas, psikologis

dan spiritualitas. Melalui pendekatan rasio nalitas, keluarga mengingatkan untung rugi (*cost-benefit ratio*) bagi diri pelaku sendiri serta seluruh anggota keluarga bila ingin memasuki ranah kuasa yang lebih tinggi dari sebelumnya atau ketika diri tidak memiliki kuasa lagi. Sedangkan dengan pendekatan psikologis, keluarga dapat membentengi anggotanya, yang tidak lagi memiliki kuasa (atau pensiun), tidak mengalami *post-power syndrome* melalui cinta, kasih sayang, perhatian dan lainnya. Sementara dengan pendekatan spiritualitas, anggota keluarga yang mengalami degradasi sosial, yang ditandai perasaan hilang kehormatan diri, stress, depresi, dan terkucilkan ditangani dengan mendekatkan diri anggota keluarga tersebut dengan kesadaran akan pentingnya "kuasa Tuhan" terhadap kehidupan manusia. Pendekatan ini tidak hanya dilakukan oleh para anggota keluarga saja tetapi juga mengundang secara sengaja sahabat atau kiayai / buya yang mengenal anggota keluarga yang mengalami *post-power syndrome* tersebut untuk bertemu dalam rangka memberi pencerahan spiritual.

Lingkungan pekerjaan merupakan kelompok sosial berikutnya yang memberikan landasan bagi terbentuknya solidaritas sosial yang dapat mencegah atau mendorong terjadinya kecanduan kuasa. Seorang pimpinan otoriter dalam masa jabatannya, meskipun ditakuti oleh bawahannya, tidak serta merta akan dihormati oleh bawahannya. Bawahan patuh karena otoritas yang melekat pada jabatan yang dimiliki pimpinan. Ketika otoritas tidak lagi melekat pada diri pimpinan, disebabkan pindah tugas atau tidak ada lagi memiliki jabatan (non job), maka bawahan tidak memiliki rasa hormat kepada mantan pimpinan. Keadaan ini menyebabkan seseorang merasa dilecehkan. Bagi mantan pimpinan yang tidak memiliki jabatan, perasaan dilecehkan dibarengi dengan rasa tidak berguna, ditelantarkan dan sedih adalah sesuatu hal yang sangat menyakitkan. Situasi tersebut dikenal dengan *post-power syndrome*. Dalam lingkungan pekerjaan, perlakuan pimpinan terhadap bawahan pada masa berkuasa menjadi *stock of knowledge* di kalangan bawahan.

## 2. Biaya Kuasa

“Tidak ada makan siang yang gratis” (*there's no such thing as a free lunch*), sebuah pepatah Barat yang dipopulerkan oleh Milton Friedman. Inti pengertian dari pepatah ini adalah tidak mungkin mendapatkan sesuatu tanpa apa-apa alias gratis. Tidak mungkin bisa mendapatkan sesuatu tanpa ada pengorbanan. Oleh karena itu, setiap pilihan memiliki satuan biaya. Sesuatu yang terlihat tanpa apa-apa untuk mendapatkannya sebenarnya ada biaya yang menyertainya atau terkait dengannya. Dalam dunia bisnis keseharian, misalnya di pasar swalayan, kita mendapatkan kenyataan penawaran bahwa kalau beli dua gratis satu, beli satu gratis satu, dan seterusnya. Kita tidak bisa mengambil gratisnya kalau kita tidak membelinya. Jadi kita tidak mungkin mendapatkan apa apa secara gratis.

Pemahaman tentang tidak mungkin mendapatkan sesuatu tanpa apa apa telah dipahami oleh masyarakat Indonesia. Dalam konteks lokal masyarakat Indonesia, misalnya di Jawa ditemukan pepatah “*jer basuki mawa bea*” (jika mau sukses perlu biaya). Kesuksesan seseorang tidak akan bisa diraih tanpa biaya. Biaya tidak selalu terkait dengan hal ekstrinsik seperti uang, barang, atau harta benda lainnya; tetapi juga bisa berhubungan hal instrinsik seperti perhatian, dukungan, perlindungan, dan sebagainya. Dalam konteks kuasa politik, terkait dengan dukungan akar rumput dalam pemilihan umum (pemilihan legislatif, kepala daerah dan presiden), “*jer basuki mawa bea*” diartikulasikan dalam “*wani piro, nomor piro*” (uangnya berapa untuk nomor berapa). Dukungan akar rumput berikan kepada seorang calon (anggota legislatif, kepala daerah atau presiden) dibayar tunai dengan pemberian uang, bahan makanan, atau barang lainnya. Pada tingkatan akar rumput, biaya politik yang dikeluarkan cenderung bersifat biaya ekstrinsik. Sedangkan dukungan anggota tim sukses dibayarkan dalam bentuk yang variatif, yaitu biaya ekstrinsik, biaya intrinsik, atau biaya ekstrinsik-intrinsik. Bila biaya politik ingin dibayarkan kepada tim sukses dengan biaya ekstrinsik, akan berbeda bentuknya dengan yang diberikan kepada akar rumput. Tim sukses tidak menerima uang recehan atau bahan makanan sebagai biaya

instrinsik. Bila biaya politik dalam bentuk biaya intrinsik diberikan kepada tim sukses maka biayanya berupa berbagai kesempatan ekonomi seperti tender proyek atau surat izin terkait aktivitas ekonomi seperti izin pertambangan. Bila tim sukses menerima dalam bentuk intrinsik maka ada kecenderungan mereka diberi jabatan di pemerintahan jika mereka sebagai pegawai negeri sipil atau membuat rekomendasi kepada siapa posisi tertentu di pemerintahan diberikan jika mereka bukan pegawai negeri sipil. Bisa juga tim sukses mendapat pengawalan birokrasi terhadap berbagai aktivitas mereka sebagai bentuk biaya instrinsik. Namun tidak tertutup kemungkinan tim sukses menerima biaya instrinsik dan biaya ekstrinsik sekali gus seperti selain mendapatkan jabatan di pemerintahan juga memperoleh jabatan sebagai “penasehat” untuk memberikan ide, gagasan, atau pemikiran tentang sesuatu.

Demikian juga dalam masyarakat Minang, ditemukan pepatah “*jariah manan tang buliah*” (jerih payah mengharap imbalan). Setiap pekerjaan yang dilakukan, dengan sadar, diharapkan akan memperoleh imbalan. Biaya politik merupakan konsekuensi logis dari suatu kerja, termasuk kerja tim sukses. Realitas biaya politik yang ditemukan di Jawa merupakan realitas Indonesia, termasuk dalam masyarakat Minangkabau.

Biaya kuasa politik dalam era “semua lawan semua”, yaitu era di mana penentuan calon anggota legislatif berdasarkan suara terbanyak sehingga seorang calon anggota legislatif tidak hanya berhadapan dengan calon anggota legislatif dari partai yang berbeda tetapi juga mengantisipasi gerakan dari calon dari partai sendiri, relatif sangat besar. Biaya besar tersebut dikeluarkan tidak hanya untuk kelompok akar rumput pemberi suara, tetapi juga untuk tim sukses serta biaya pengamanan suara pada berbagai level (mulai dari level kotak suara sampai KPU). Jika suara tidak dikawal maka suara tersebut bisa berpindah kepada teman separtai, bahkan bisa pindah kepada calon dari partai lawan. Situasi ini memberikan wadah yang kondusif bagi bibit politik transaksional yang telah diperaktekan pada masa Orde Baru untuk bertumbuhkembang secara masif pada Era Reformasi sehingga merusak sendi-sendi demokrasi. Biaya

kuasa politik, khususnya kepala daerah, berkorelasi positif dengan potensi sumber daya alam (SDA) daerah tersebut. Semakin kaya suatu daerah akan sumber daya alamnya (seperti minyak bumi, batu bara, dan bahan mineral lainnya) maka semakin besar biaya kuasa politiknya. Biaya politik untuk meraih kuasa di provinsi Jambi lebih besar dibandingkan dengan di Sumatera Barat. Biaya politik di Kabupaten Bungo Jambi lebih besar dibandingkan dengan di Kabupaten Agam Sumatera Barat.

Biaya politik merupakan premium bagi bergeraknya kenderaan politik. Bila tidak ada biaya politik, maka kenderaan politik tidak bisa bergerak. Analogi seperti inilah yang dibangun di kalangan politisi. Berbagai macam istilah biaya politik yang harus dikeluarkan oleh seseorang untuk kuasa, yaitu antara lain uang konstituen, uang mahar politik, uang kenderaan politik, uang kader partai, uang promosi politik, dan sebagainya. Setiap daerah memiliki nomenklatur tersendiri tentang uang politik.

Realitas seperti ini menyebabkan semakin tinggi biaya kuasa yang dikeluarkan, semakin erat seseorang memegang kuasa, sehingga semakin tinggi kecenderungan seseorang cendu kuasa.

## F. KESIMPULAN

**K**ecanduan kuasa merupakan topik baru dalam kajian sosiologi dan antropologi. Kuasa pada dasarnya merupakan konsep netral, mengalami denetralisasi melalui konstruksi sosial atas kuasa dengan proses dialektika objektivasi, internalisasi dan eksternalisasi. Proses interpretasi dan konstruksi sosial atas kuasa menciptakan 3 tipe kecanduan kuasa, yaitu gemar kuasa, diri kuasa dan sakau kuasa. Munculnya kecanduan kuasa disebabkan oleh interpretasi dan konstruksi sosial tertentu atas kuasa dan dipertegas oleh solidaritas sosial yang dimiliki oleh seseorang dan biaya kuasa yang dikeluarkan.

## Daftar Pustaka

- Berger, P. L. dan T. Luckmann (1990) *Tafsir Sosial Atas Kenyataan, Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan* (terj.). Jakarta: LP3ES.
- Craig, I. (1986). *Teori Teori Sosial Modern*. Jakarta: Rajawali Press.
- Damsar (2010) *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Prenada
- Johnson, D.P. (1986), *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. Jilid 1 & 2 (terj.) Jakarta: Gramedia.
- Marx, Karl (1843/1970) *Marx's Critique of Hegel's Philosophy of Right*. Cambridge: Cambridge University Presss diedit oleh Joseph O'Malley
- Poloma, M.M. (1984). *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Press.
- West, Robert (2006) *Theory of Addiction*. Oxford, UK: Blackwell Publishing.